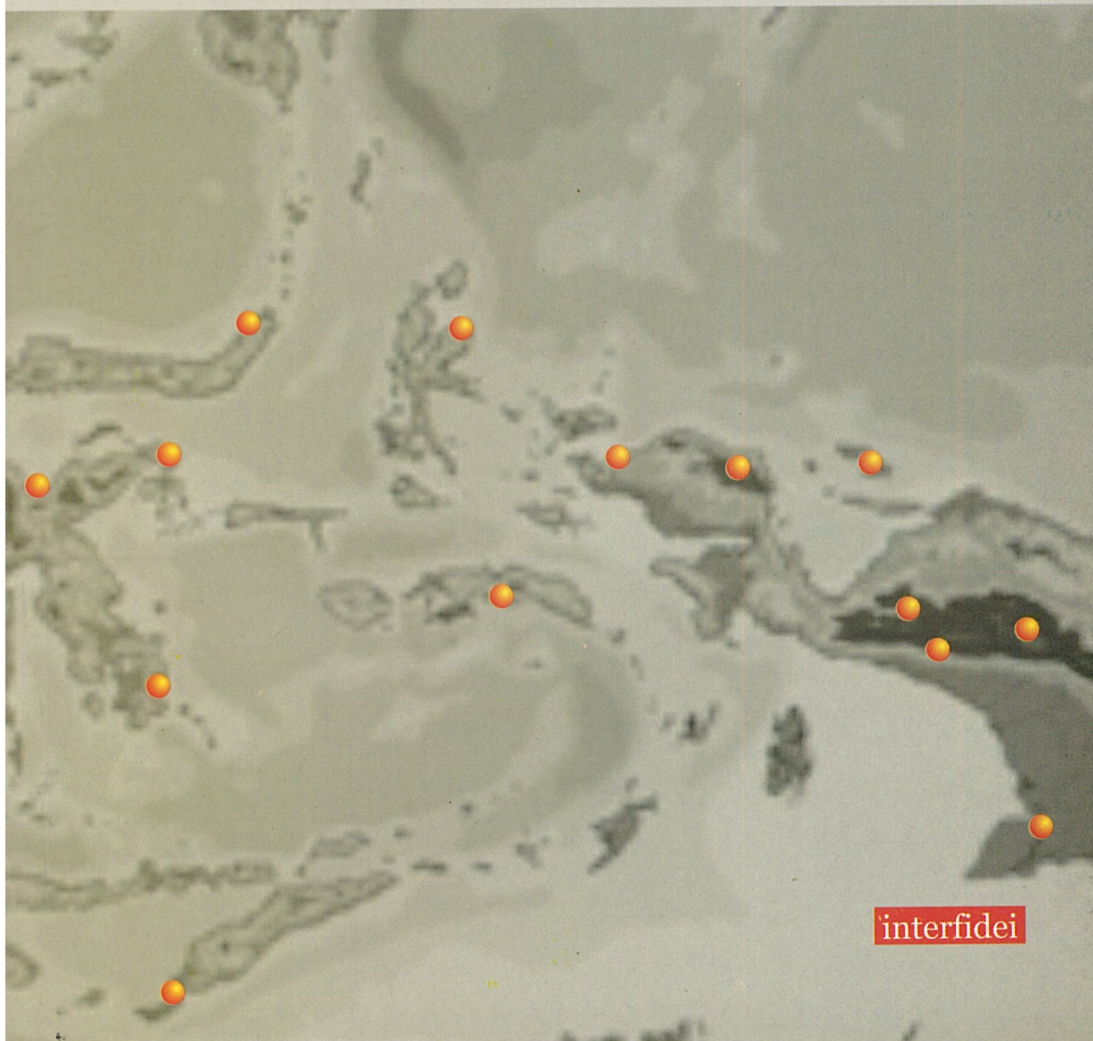


100 ORANG INDONESIA

Angkat Pena
DEMI

DIALOG PAPUA



interfidei

**100 ORANG INDONESIA
ANGKAT PENA DEMI DIALOG PAPUA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Interfidei

**100 ORANG INDONESIA
ANGKAT PENA DEMI DIALOG PAPUA**

**Editor:
Elga J. Sarapung**

Alamat:

Jalan Banteng Utama 59, Yogyakarta 55581- Indonesia

ph: 62-274-880149 - fax: 62-274-887864

website: <http://www.interfidei.or.id>

Email: dianinterfidei@yahoo.com

Interfidei

100 ORANG INDONESIA ANGKAT PENA DEMI DIALOG PAPUA

Editor: Elga J. Sarapung

Diterbitkan oleh:

Interfidei

Jalan Banteng Utama 59, Yogyakarta 55581- Indonesia

ph: 62-274-880149 - fax: 62-274-887864

website: <http://www.interfidei.or.id>

Email: dianinterfidei@yahoo.com

Kulit Muka & Tata Letak: Agvenda

15,5 x 23 cm; xx + 438 halaman

Edisi I, cetakan ke-1, Juli 2013

ISBN: 979-8726-49-9



Pengantar Penerbit

Gagasan tentang “Dialog Jakarta-Papua” sudah cukup lama disampaikan melalui berbagai media publik. Salah satu yang konsisten tanpa henti, adalah yang ditemukan dalam buku “Angkat Pena Demi Dialog Papua”, kumpulan 54 artikel opini, yang ditulis secara pribadi oleh Pater Neles Keadabi Tebay sejak tahun 2001-2011, terbit tahun 2011, dan sudah dicetak ulang. Buku tersebut sudah diluncurkan dan didiskusikan di kalangan luas, di Jakarta tanggal 29 Mei 2012 dan di Jogjakarta 20 Juni 2012. Peluncuran di Jayapura dilakukan pada tanggal 19 September 2012.

Salah satu gagasan yang muncul sebagai tindaklanjut dari acara peluncuran dan diskusi buku tersebut adalah, menerbitkan satu buku yang berisi tulisan singkat dari 100 orang Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh.

Kami tahu bahwa ada banyak warga Indonesia yang mengikuti perkembangan pemikiran tentang Papua dan berita-berita tentang keadaan di Tanah Papua. Mereka prihatin sekaligus berharap bahwa persoalan Papua perlu diselesaikan segera dengan cara-cara yang elegan, tanpa kekerasan, beradab. Dengan demikian masyarakat Papua bisa hidup tenang, tanpa ketakutan, tanpa stigma. Dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai aktivitas, mereka bisa membangun kehidupan yang sungguh-sungguh manusiawi sebagai sesama warga negara Indonesia.

Tulisan dalam buku ini sangat bervariasi, sesuai dengan pemikiran, pengalaman dan konteks dari masing-masing penulis. Intinya adalah, tentang pikiran-pikiran konkrit mereka tentang dialog sebagai jalan damai untuk menyelesaikan masalah Papua. Dialog yang sudah dimulai dengan

sosialisasi wacana, konsep dan pertemuan-pertemuan serta percakapan-percakapan, di Tanah Papua, di Jakarta dan di beberapa daerah yang lain, bahkan di dunia Internasional perlu ditingkatkan menjadi sebuah dialog yang lebih terencana, terprogram dengan baik dan jelas. Dengan demikian, dialog menjadi sebuah tindakan konkrit dan dapat berjalan dengan baik, serius dan memenuhi harapan semua pihak, yakni masyarakat Papua di seluruh Tanah Papua, di luar Tanah Papua, Pemerintah Indonesia di Jakarta dan di Tanah Papua, dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Buku ini berjudul "100 orang Indonesia angkat pena demi dialog Papua". Tetapi, Anda-para pembaca-akan menemukan 99 tulisan saja. Para penulis adalah orang-orang yang berlatarbelakang berbeda-beda, terdiri dari 23 orang perempuan, 76 orang laki-laki ditambah dengan dua pemberi kata pengantar. Mereka dari berbagai generasi dan latarbelakang sosial-budaya, etnis, agama. Mereka berasal dari 25 propinsi. Ada budayawan, akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, guru, jurnalis, tokoh masyarakat, tokoh agama-agama, tokoh adat.

Sengaja kami mengumpulkan hanya 99 tulisan, termasuk beberapa bahan dari narasumber pada saat peluncuran dan diskusi buku "Angkat Pena". Maksudnya, memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia "yang ke-100", yaitu mereka yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang mempunyai perhatian, keprihatinan serta harapan yang sama, yang tidak dapat dilibatkan dalam penerbitan buku ini, lebih karena alasan teknis. Buku akan menjadi sangat tebal.

Ke-99 tulisan ini kiranya memberi kekuatan dengan "energi positif" kepada semua pikiran, hati nurani, semua usaha, kerja-kerja dari semua orang, di Jakarta, di Tanah Papua, di seluruh Indonesia dan di luar Negeri untuk sungguh-sungguh menginginkan, berharap, dan melakukan hal-hal konkrit demi merealisasikan Papua menjadi Tanah Damai, Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan beradab.

Terima kasih banyak kepada para penulis, mulai dari mereka yang sudah memasukkan tulisan pada waktunya dengan rencana awal dan yang selalu bertanya-tanya, "apakah buku Papua sudah terbit?" Atau "kapan buku Papua itu terbit?", sampai kepada mereka yang akhirnya

□ diminta untuk menulis dan segera memasukkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada beberapa yang kemudian di tengah jalan, mundur karena kesibukan tak kunjung berhenti, ada juga karena sakit.

Pemberi kata pengantar untuk buku ini, sengaja memilih dua orang, satu dari Papua, Uskup Leo Labalajar, OFM lainnya dari luar Papua, Prof. Dr. Daoed Joesoef. Kami berterima kasih kepada Prof. Dr. Daoed Joesoef, yang sudah memasukkan bahan Kata Pengantar, ketika baru kira-kira 12 tulisan yang masuk. Kami mengapresiasi kesediaan, dan keseriusan Bapak Daoed Joesoef untuk memberi perhatian kepada persoalan Papua yang adalah persoalan bangsa Indonesia. Juga kepada Uskup Leo Labalajar, yang telah menulis secara khusus Pengantar singkat-padat untuk buku ini. Terima kasih juga atas kesabaran Bapak berdua yang menunggu terbitnya buku ini. Terima kasih juga kepada Sdr. Killion Wenda, staf di kantor Jaringan Damai Papua (JDP), di Abepura, yang selalu bersedia diganggu untuk mencari dan mengirimkan foto-foto yang diperlukan.

Semua ini menandakan betapa merealisasikan dan menjalankan dialog itu tidak mudah, perlu kesabaran, perlu komunikasi terbuka terus-menerus. Satu hal yang pasti adalah, bila ada kemauan yang sungguh-sungguh, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, harapan akan tercapai, Papua menjadi Tanah Damai, Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab.

Yogyakarta, 15 Juni 2013

Elga J. Sarapung

Institut DIAN/Interfidei

Jalan Banteng Utama 59 Yogyakarta 55581

<http://www.interfidei.or.id>

Pengantar

DAMAI, DIALOG DAN KONSENSUS

Prof. Dr. Daoed Joesoef¹

Warga masyarakat Papua semakin bergolak. Pergolakan ini merupakan manifestasi dari ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, terhadap pembangunan perwujudan keindonesiaan kita selama ini dan terhadap cara penanganan pemerintah atas manifestasi dari ketidakpuasan tadi.

Ketidakpuasan tersebut sejujurnya ada di seluruh wilayah NKRI dalam derajat yang berbeda. Yang memprihatinkan kita sebenarnya bukan hanya pemerataan ketidakpuasan itu *an sich*, tetapi juga ketidakpedulian warga kepada mereka yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengatur negeri tercinta ini. Mereka kelihatannya asyik memikirkan bagaimana bisa berkuasa hanya demi kekuasaan yang berkelanjutan. Mereka ini terdiri tidak hanya atas tokoh-tokoh yang berada di pusat (Jakarta), tetapi juga putera-puteri daerah yang dipercaya mengendalikan pemerintahan di daerahnya masing-masing dengan dalih “otonomi”, “pemekaran wilayah” dan slogan muluk lainnya yang menutup-nutupi aspirasi kekuasaan pribadi dan/atau kelompok primordial.

Jadi tidak tepat kiranya kalau dibangkitkan gagasan “dialog Jakarta-Papua” dalam kondisi seperti ini. Akan lebih fungsional kalau kita secara jujur mendorong diri masing-masing untuk berdialog dengan nurani sendiri dan sekaligus berdialog dengan dan di antara sesama, selaku warganegara yang setara, sederajat dan bertanggung jawab bersendikan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Azas fundamental dari kesetaraan (*equality*) warganegara ini merupakan dasar bagi demokrasi modern.

¹ Pemerhati persoalan Papua, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dialog akan sehat dan berguna bila penalarannya didasarkan atas pendapat yang tertulis jelas. Buku ini penalarannya didasarkan atas pendapat yang tertulis jelas. Buku ini merupakan kumpulan dari pendapat-pendapat tersebut. Ia adalah hasil “angkat pena” dari para pemikir andalan kita yang tersebar di seluruh tanah-air. Walaupun semua tulisan berkisar pada masalah masyarakat Papua, ia pantas dimanfaatkan untuk mencari dan menemukan solusi ketidakpuasan daerah-daerah lain yang banyak sedikitnya beratur sama.

Saya tidak akan mengomentari tulisan-tulisan yang ada di buku ini satu per satu. Saya silahkan setiap pembaca mengevaluasinya sendiri bersendekian kepekaan masing-masing. Pembacaan buah pikiran yang beraneka ragam sungguh dianjurkan karena bermanfaat, memungkinkan orang bisa menjadi “lebih luhur”, “lebih kaya” secara intelektual. Perlu diakui bahwa walaupun semua dan setiap kita, selaku warganegara, adalah setara mengenai hak-hak, tentu ada di antara kita yang tetap masih tidak setara dalam kemampuan turut mengatur dan mempengaruhi perumusan kebijakan dalam penanganan urusan bersama.

Warga masyarakat Papua berusaha membuat “Papua menjadi Tanah Damai”. Perdamaian terwujud apabila kelompok-kelompok - daerah, suku, komunitas religious dan adat – merasa puas karena telah berkesempatan menghayati nilai, atau setelah ada kepastian bahwa penghayatan tersebut akan bisa terlaksana, sedangkan kematian biologisnya tidak mengandung unsur bunuh diri kolektif yang terpaksa atau pembunuhan yang teroganisir, terstruktur dan dipimpin dengan dalih demi keamanan nasional.

Maka demi perdamaian sejati itu perlu ada dialog. Sebab kalau peperangan bisa digerakkan oleh satu orang, untuk menimbulkan perdamaian diperlukan paling sedikit dua orang yang tidak sejalan. Dengan kata lain, perlu dialog di antara para pemangku kepentingan. Dialog yang dengan sadar diarahkan ke pencapaian konsensus. Jadi sama-sama melaksanakan satu sistem yang sekaligus merupakan suatu proses pembicaraan di antara warga negara yang setara dan sederajat (musyawarah) dan hasil pertukaran dari para manusia yang bermartabat, sama-sama punya “*humanist outlook, and not just simplistic hegemonial one*” (mufakat).

Konsensus? Ya, konsensus! Semua silang pendapat tentang satu istilah yang bermakna jalan ke arah perdamaian. Semua monolog *eulogistic* mengenai satu konsep yang mengandung dialog. Semua intoleransi, atas nama suatu gagasan yang tidak bisa dipahami tanpa spirit toleransi yang sadar. Memang ada kecenderungan setiap orang berusaha mengambil alih, demi kemanfaatan sendiri, suatu istilah yang hakikat sejatinya mengandung gagasan "*fair and free sharing*". Maka subjek yang begitu luas dan kompleks – damai, dialog, konsensus, musyawarah, mufakat – jelas memerlukan pemikiran yang mendalam, sebab renungan yang dangkal, sepintas lalu dan tergesa-gesa akan bermuara pada kekeliruan, kesalahpahaman dan omisi.

Dari artikel yang dikumpulkan oleh buku ini jelas kelihatan betapa para penulisnya telah berusaha keras untuk mengelakkan jebakan-jebakan dari interpretasi kategoris tentang konsensus. Walaupun di sana-sini terlihat perbedaan dalam sensibilitas dan cara pendekatan, yang sungguh menyuburkan pertumbuhan intelektualitas, setiap penulis terkesan mengadopsi dalam karya tulisnya suatu perspektif yang terbuka bagi pertanyaan dan kritikan. Ketidakmauan bersama untuk pasrah begitu saja pada setiap koma dogmatis ini dalam dirinya sudah merupakan suatu manifestasi dari dan suatu sikap yang mengacu pada spirit konsensus yang jenuin.

Konsensus? Ya! Walaupun Indonesia sering disebut *by nature* merupakan negara bangsa maritim yang bertaburkan pulau-pulau terpisah, memang benar, namun tidak boleh ada warga negara yang merasa dirinya berupa pulau yang menyendiri. Semua dan setiap warganegara Indonesia bersama-sama sesama warganegara yang berada di pulau atau daerah berbeda serta berlainan suku, berbagi tanggung jawab atas nasib kemanusiaan kita. Kalau takdir merupakan hak prerogative Tuhan Sang Pencipta, nasib ada di tangan kita sendiri.

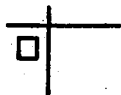
Bila demikian misi bersama kita adalah memikirkan, mencari dan menerjemahkan ke dalam aksi bersama yang dapat menyumbang *inter alia* ke arah perwujudan "*a just and durable peace*" di NKRI. Sulit dibayangkan bahwa solusi seperti ini dapat dicapai dengan penerapan azas mayoritas, mengingat implementasinya menuntut partisipasi aktif dan komitmen dari semua anak suku dan putera-puteri daerah. Kita diminta

bersepakat untuk sehidup dan semati, kita yang sama-sama telah membentuk NKRI.

Semua gagasan tertulis hasil dari “angkat pena demi dialog Papua” memang *by its very nature* tertuju pada pikiran yang bersarang dalam benak. Namun berhubung tujuan – akhir dari dialog adalah sesuatu yang praktis, persepakatan di antara pikiran perlu dicapai secara spontan, tidak berdasarkan suatu konsep abstrak bersama, tetapi bersendikan suatu konsep praktis bersama, tidak berdasarkan afirmasi mengenai satu visi yang sama, tetapi bersendikan afirmasi tentang suatu korpus tunggal kepercayaan dalam aksi penanganan masalah yang dihadapi bersama. Hal ini memang belum seberapa, namun ia merupakan benteng yang tersisa dalam benak kita di mana pikiran dapat saling bertemu. Jika perang berawal dalam benak manusia, maka di dalam benak manusia itu harus dibangun benteng perdamaian.

Hal tersebut dapat membenarkan adanya upaya besar, bahkan suatu tugas besar kewarganegaraan untuk menciptakan “damai” tidak hanya dalam “benak manusia Indonesia”, tetapi juga dalam “hati manusia Indonesia”. Filosof – matematikawan Pascal pernah berujar “*le Coeur a ses raisons que la raison ne peut pas expliquer*”, “*the heart has its reasons when reason cannot explain*”, “hati punya penalarannya sendiri bila nalar tidak bisa menjelaskan alasannya”.

Jakarta, akhir Desember 2012



Pengantar

Dialog: Mencari Titik Pijak Bersama

Dr. Leo Laba Ladjar, OFM¹

Gejolak yang sudah bertahun-tahun berlangsung di Tanah Papua adalah tanda ada masalah. Gejolak yang berkepanjangan itu seperti lumpur lapindo yang tertekan dan terkurung di bawah permukaan bumi. Tetapi begitu ada celah, ia menyembur ke luar dan mengharubirukan semua yang ada di permukaan bumi. Orang bertanya apa masalahnya? Masalah politik? Kesejahteraan? Hak asasi dan martabat manusia? Para analis sosial bisa merumuskan macam-macam jawaban tentatif, tetapi gejolak hati berlangsung terus. Gejolak hati, gejolak perasaan memang tidak gampang dirumuskan dan diberi nama yang bisa membuat kita berkata, "Ha! Itu sudah!".

Ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang menggerakkan gejolak itu. Dengan kekerasan? Sudah disadari dan diakui bahwa cara itu tidak menyelesaikan masalah tetapi, sebaliknya, memperbanyak masalah. Lalu ditemukan cara lain yang secara halus disebut pendekatan keamanan. Nyatanya, itu berarti pendekatan bersenjata yang justru tidak menciptakan rasa aman. Pendekatan kesejahteraan? Bagus. Tetapi tidak serta-merta diterima, karena dianggap gagasan sepihak, dijatuhkan "dari atas" untuk menjinakkan yang di bawah. Masalah sosial, apalagi yang sudah menyangkut hati dan rasa, memang tidak mudah diselesaikan dengan cara-cara yang diperhitungkan dengan nalar yang bernas.

Suku-suku bangsa kita mengenal berbagai cara untuk menyelesaikan masalah secara damai. Antara lain mereka berkumpul di "rumah-adat" dan berbicara. Mereka tidak duduk di meja panjang atau meja bundar untuk

¹ Uskup Jayapura, Papua

diskusi dan debat dengan sasaran siapa kalah siapa menang. Mereka duduk di tikar dan berbicara, atau mencetuskan perasaan dan pikirannya tanpa aturan. Sasaran yang dicapai bukan siapa kalah siapa menang, tetapi menerima apa yang perlu dan berguna untuk kita semua.

Proses itu kita kenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Istilah lain, dari budaya lain, adalah dialog. Dialog bukan diskusi ilmuwan, bukan debat politik, tetapi juga bukan sekedar obrol-mengobrol. Diandaikan bahwa pihak-pihak yang berdialog merasa setara, duduk sama rendah atas tikar yang sama, sehingga yang satu bisa merasakan perasaan yang lain dan memahami pikirannya; dan kedua pihak dengan leluasa bisa mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Pada awal, luapan emosi pasti lebih dominan, lebih-lebih dari pihak yang lama merasa tertekan. Tetapi, setelah lumpur-lumpur disemburkan, diharapkan hati terbuka dan budi menjadi cerah untuk bersama-sama mencari dan menemukan titik-pijak bersama untuk melangkah maju mengatasi masalah.

Dialog tidak gampang antara dua pihak yang nyatanya tidak setara, seperti antara pemerintah dan sekelompok masyarakat, antara pengawal kedaulatan negara dan kaum separatis, atau antara penjaga kebenaran dalam satu agama dan kelompok sempalan. Dialog tidak mudah diterima karena yang berada di posisi yang kuat biasanya tidak mampu mendengarkan dan merasakan pihak yang lemah. Sasaran pihak yang kuat bukan untuk mendapatkan titik-pijak yang sama yang membuat kedua belah pihak sama-sama menang; target pihak yang lebih kuat itu adalah mau "mengajari" dan "mempertobatkan" pihak lain yang ada dalam posisi yang lemah.

Supaya dialog terlaksana, pihak yang kuat harus berani turun, duduk di tikar bersama yang lain. Lalu buka telinga untuk mendengarkan, buka hati untuk merasakan dan, kalau tiba waktunya, barulah buka mulut untuk bicara. Turun dari kursi ke tikar memang tidak gampang dan tidak enak juga. Berbicara lebih menyenangkan daripada mendengarkan. Tetapi gejala hati yang gemuruh karena aneka masalah mengharapkan mitra dialog yang telinganya besar dan siap terpasang seperti antena parabola, sehingga bisa menangkap semua getaran gelombang dari hati, juga yang tidak diucapkan.

□ Di Tanah Papua orang gampang sekali berbicara mengenai kasih. Selain pendeta dan pastor, polisi dan tentara pun gencar menyerukan bahwa kasih itu indah. Nah, untuk berdialog, perintah cinta kasih itu berbunyi begini: *Dengarkanlah sesamamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu nyatakanlah perasaan dan pikiranmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.*

DAFTAR ISI

	Elga Sarapung - Pengantar Penerbit	v
	Prof. Dr. Daoed Joesoef - Pengantar	ix
	Dr. Leo Laba Ladjar, OFM - Pengantar	xiii
1	Angela Flassy - (Jayapura, Propinsi Papua)	1
2	Andreas Goo - (Jayapura, Propinsi Papua)	5
3	B. Josie Susilo Hardianto - (Jayapura, Propinsi Papua)	8
4	IGM Sunartha - (Jayapura, Propinsi Papua)	14
5	Latifah Anum Siregar, SH - (Jayapura, Propinsi Papua)	20
6	Leonard Imbiri - (Jayapura, Propinsi Papua)	24
7	Lucky Ireeuw - (Jayapura, Propinsi Papua)	28
8	Dr. Mansur M., SH., MM - (Jayapura, Propinsi Papua)	32
9	Mientje D.E. Roembiak - (Jayapura, Propinsi Papua)	36
10	Nani Uswanas - (Jayapura, Propinsi Papua)	41
11	Dr. Sostenes Sumihe - (Jayapura, Propinsi Papua)	45
12	Yakobus Dumupa - (Jayapura, Propinsi Papua)	50
13	Yan Christian Warinussy - (Manokwari, Propinsi Papua Barat) ..	54
14	Samuel Asse Bless - (Manokwari, Propinsi Papua Barat)	56
15	Dr. Abidin Wakano - (Ambon, Propinsi Maluku)	66
16	Jacky Manuputty, MTh. - (Ambon, Propinsi Maluku)	69
17	Dr. Julianus Mojau - (Tobelo, Halmahera, Propinsi Maluku Utara)	72
18	Dr. Arlina Gunarya - (Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)	75
19	Prof. Dr. M. Qasim Mathar - (Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)	80
20	Dr. Zakaria Ngelow - (Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)	85
21	Asliah Zainal, S.Ag, S.Pd, M.A. - (Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara)	90

22	Samsi Pomalingo, MA - (Gorontalo, Propinsi Gorontalo)	95
23	Drs. Abdul Malik Sjahadat - (Tentena-Poso, Propinsi Sulawesi Tengah)	99
24	Lian Gogali, MA - (Tentena-Poso, Propinsi Sulawesi Tengah) ..	103
25	Prof. Dr. Adolf Sinolungan, SH - (Manado, Propinsi Sulawesi Utara)	108
26	Dr. Nico Gara - (Manado, Propinsi Sulawesi Utara)	112
27	Dr. Yohannis Ohoitumur, MSC - (Manado, Propinsi Sulawesi Utara)	114
28	Roedy Haryo Widjono AMZ - (Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur)	117
29	Dr. Darius Dubut - (Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan)	121
30	Noorhalis Majid, MA - (Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan)	124
31	Dr. Marko Mahin - (Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah)	128
32	Richardus Giring, MA - (Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat)	131
33	Dr. Mery Kolimon - (Kupang, Propinsi NTT)	138
34	Pius Rengka - (Kupang, Propinsi NTT)	145
35	Irfan Suriadiata - (Mataram, Propinsi NTB)	149
36	I Nyoman Sadra - (Tenganan, Karangasem, Propinsi Bali)	154
37	Dr. Hotman M. Siahaan - (Surabaya, Propinsi Jawa Timur)	157
38	Esthi Susanti Hudiono, MA - (Surabaya, Propinsi Jawa Timur) ..	161
39	Ciciek Farha, MA - (Jember, Propinsi Jawa Timur)	164
40	Joseph Widyatmadja - (Solo, Propinsi Jawa Tengah)	167
41	Tedi Kholiludin - (Semarang, Propinsi Jawa Tengah)	172
42	M. Tafsir - (Semarang, Propinsi Jawa Tengah)	177
43	Dr. Rahayu, SH, M. Hum - (Semarang, Propinsi Jawa Tengah) ..	180
44	Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera - (Magelang, Propinsi Jawa Tengah)	185
45	Dr. Budi Subanar, SJ - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	188
46	Gusti Kanjeng Ratu Hemas - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	190
47	M. Imam Aziz - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	192

48	Prof. Dr. Musa Asy'arie - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	195
49	Prof. Dr. PM Laksono - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	199
50	Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	210
51	Prof. Dr. Mohtar Mas'ood - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	213
52	Rizal Panggabean, MA - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	218
53	Dr. Waryono Abdul Ghafur - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	221
54	Anis Farikhatin, MA - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	225
55	Dr. Albertus Patty - (Bandung, Propinsi Jawa Barat)	227
56	Prof. Dr. Bambang Sugiharto - (Bandung, Propinsi Jawa Barat)	230
57	Kyai Muhammad Husein - (Cirebon, Propinsi Jawa Barat)	232
58	Dr. Abdul Mu'ti - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	235
59	Arswendo Atmowiloto - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	239
60	Dr. Andreas A. Yewangoe - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	244
61	Prof. Dr. Azyumardi Azra - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	247
62	Dr. Chandra Setiawan - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	250
63	Dr. Djohan Effendi - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	253
64	Dra. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	257
65	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	262
66	Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	266
67	Dr. Marzuki Darusman - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	270
68	Nia Syarifuddin - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	272
69	Miryam S.V. Nainggolan - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	277
70	Dr. Nur Iman Subono - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	281
71	Roichatul Aswidah - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	286
72	Benny Susetyo, Pr - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	288
73	Putu Wijaya - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	292
74	Ahmad Suaedy - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	294
75	Albert Hasibuan - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	297

76	Tubagus Hasanudin - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	302
77	Farid Husein - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	308
78	Bambang Widodo Umar - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	312
79	Adriana Elizabeth - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	315
80	Joseph Adi Prasetyo - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	319
81	Poengky Indarti - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	334
82	Usman Hamid - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	340
83	Inggrid Galuh Mustikawati - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta) ...	344
84	Mgr. I. Suharyo - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	351
85	Ikrar Nusabhakti - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	354
86	Hendaradi - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	360
87	Otto Syamsuddin - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	363
88	Sylvana Ranti-Apituley - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	367
89	Eva Sundari - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	372
90	Edwin Tambunan - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	374
91	Freddy Numberi - (Jakarta, Propinsi DKI Jakarta)	380
92	Vegitya Ramadhani Putri - (Palembang, Propinsi Sumatera Selatan)	383
93	Muhammad Taufik, MA - (Padang, Propinsi Sumatera Barat) ..	390
94	Majda El Muhtaj - (Medan, Propinsi Sumatera Utara)	395
95	Prof. Dr. Bungaran Simanjuntak - (Medan, Propinsi Sumatera Utara)	400
96	Eliakim Sitorus - (Tapaktuan, Propinsi Nagroe Aceh Darrusalam)	404
97	Norma Susanti RM - (Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Nagroe Aceh Darrusalam)	407
98	Saifuddin Bantasyam - (Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Nagroe Aceh Darrusalam)	411
99	Teuku Kemal Fasya, MA - (Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Nagroe Aceh Darrusalam)	415
	Neles Keadabi Tebay- Epilog	420
	Lampiran	423

Dialog Sebagai Jalan Bukan Tujuan

Waryono Abdul Ghafur¹

SEJAK AWAL berdirinya, Indonesia adalah negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity/e pluribus unum*). Pasca runtuhnya Orde Baru dan Indonesia memasuki era Reformasi, 'kata mutiara' ini harus terus dihidupkan dan dibesarkan kembali gaungnya, karena semakin membesar dan meluasnya perilaku dan bahkan ada kebijakan publik yang mengarah pada penghilangan atau setidaknya menggerus nilai-nilai kebhinekaan tersebut. Untuk menyebut sekadar contoh, adalah adanya debat panjang dan kontroversial mengenai UU Pornografi, diberlakukannya Perda Syari'ah di beberapa daerah, dan lain-lain. Dua contoh tersebut cukup memberi pengaruh pada semakin memudahkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, beragam, plural dalam banyak hal: agama, suku, etnis, bahasa, adat-istiadat dan lain-lain. Ditemukannya alat komunikasi dan sarana informasi yang canggih serta mobilitas penduduk antar daerah, kini tidak ada satu kawasan pun, termasuk di wilayah Indonesia yang steril dari adanya persentuhan dan hubungan antar masyarakat yang beragam. Karena itu, teknologi informasi dan komunikasi justru mengukuhkan pentingnya pemeliharaan prinsip Bhineka Tunggal Ika tersebut. Prinsip itulah yang akan menjadikan manusia -dengan keragamannya- untuk terus terdorong hidup bersama dalam perbedaan dan saling menguatkan, bukan pembedaan dan saling menegasikan.

Persoalan lain yang masih menggelayuti 'kaki dan sayap burung Garuda' adalah masih belum mempunyai pemerintah sebagai aparat

¹ Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

² Menyusul kemudian adalah Papua Barat, Maluku, NTT, Aceh, NTB, Bengkulu, Gorontalo, DI. Yogyakarta, dan Lampung, REPUBLIKA, Jum'at, 18 Januari 2013, h. 28.

yang mendapat amanah untuk menjalankan konstitusi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita eksistensial negara-bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dengan keanekaragamannya), memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dari empat tujuan dan cita-cita tersebut hanya nomor empat yang cukup menonjol sudah diperankan oleh Indonesia yang *notabene* hal itu bersifat eksternal, sementara tiga yang pertama yang bersifat internal, 'masih jauh panggang dari api', meski pada 2013 ini, Indonesia akan memperingati HUT kemerdekaan yang ke-68. Ini artinya, kalau pemerintah tidak melakukan upaya sungguh-sungguh mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, maka dapat disebut sebagai pemerintahan yang tidak konstitusional. Apa yang disebutkan dalam pembukaan UUD 45 tersebut, bukan sesuatu yang perlu didialogkan, tapi terus diingatkan, agar segera terwujud dan dirasakan oleh warga-bangsa Indonesia apa pun etnis, suku, dan agamanya dan di mana pun keberadaannya, baik ia di Indonesia maupun di luar negeri.

Era reformasi yang digadang-gadang menjadi pintu masuk percepatan perwujudan tujuan dan cita-cita didirikannya negara ini belum menampakkan 'wajah' yang sesungguhnya. Negara tak kunjung memerdekakan bagian besar warganya dari himpitan hidup yang semakin berat, karena kemiskinan yang akut. Memasuki Januari 2013, masih tercatat ada 10 provinsi dengan penduduk miskin tertinggi dan dari 10 provinsi itu, yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah Papua, yaitu 30,66%.² Ini tentu sebuah ironi, karena Papua adalah salah satu provinsi terkaya sumber daya alamnya dan salah satu penyumbang negara terbesar dari sumber daya alamnya tersebut. Kemiskinan yang tinggi di Papua cukup sebagai petunjuk bahwa Negara, melalui pemerintah yang mengelolanya masih belum mampu memberikan kesejahteraan kepada mereka. Secara ekonomi, hidup mereka bagaikan "ayam mati di lumbung padi". Sangat ironis memang. Sebagai akibatnya, menurut catatan Neles (h. 124), setidaknya sampai 2008, anak-anak Papua di kampung belum mendapatkan

pendidikan yang bermutu, pada 2008 juga tercatat, 200 orang di Kabupaten Dogiyai Papua meninggal karena kolera (tingkat kesehatan yang rendah), dan penyebaran HIV/AIDS yang sangat cepat (h. 114). Fenomena ini justru terjadi setelah Jakarta mengeluarkan kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua.

Pada sisi lain, memang benar bahwa “bantuan pemerintah yang kembali ke Papua” memang paling besar (disebut oleh Neles; triliyunan rupiah) dibanding yang diberikan ke provinsi lain, namun bantuan itu gagal mengentaskan hidup mereka dari kemiskinan. Hal ini karena sejak awal pemerintah salah “menggunakan bahasa”. Bahasa yg digunakan pemerintah tidak konstitusional, yaitu “bantuan”, padahal mereka bukan orang lain dan luar yang harus dibantu. Masyarakat Papua adalah warga Indonesia yang harus dilindungi sebagaimana warga Indonesia yang lain, sehingga menjadi warga yang sehat, cerdas dan bermartabat serta merasakan hidup aman, jauh dari intimidasi dan marginalisasi serta pelabelan negative yang ujung-ujungnya adalah perlakuan keras dan kasar kepada mereka. Kesalahan bahasa tersebut kemudian diperparah dengan kesalahan pendekatan pemerintah dalam memaknai “bantuan”. Ada kecenderungan, rakyat Papua diperlakukan seperti ayam broiler, kebutuhannya dipenuhi, tetapi dibuat bergantung pada pemerintah dan hidupnya dibatasi dalam “kandang”, semuanya harus mengikuti Jakarta. Akibatnya dapat diduga, kebijakan yang dibuat Jakarta untuk Papua tidak menyelesaikan masalah yang real terjadi di Papua, seperti kemiskinan yang tinggi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan yang rendah, dan keamanan. Dua contoh dapat dikemukakan di sini, yaitu mengenai UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada 2001 dan pembentukan Provinsi Papua Barat. Dua kebijakan tersebut belum dapat “mengubah takdir” rakyat Papua, terutama “orang asli Papua” menjadi lebih berdaya dan bermakna. Karena rendahnya ketrampilan dan pendidikan mereka, kantong-kantong atau peluang pekerjaan baru di provinsi baru tersebut, hanya bisa diisi oleh “mereka yang dari luar” yang pasti bukan asli Papua.

Dua kebijakan tersebut merupakan buah dari paradigma yang salah dalam mengelola Negara dan pemerintahan, yaitu paradigma

politicking dan paradigma ekonomi. Paradigma pertama lebih mengedepankan “menang-menangan” atau siapa yang kuat dan berkuasa, sementara paradigma kedua lebih menekankan *profit taking*, ambil untung atau apa untungnya. Dengan demikian sudah dapat diprediksi bahwa dua kebijakan di atas hanya memenangkan dan menguntungkan yang berkuasa. Rakyat Papua tidak mendapatkan keuntungan dan manfaat dari kebijakan itu. Harapan dan idealitas dari dua kebijakan itu; tingkat kesejahteraan hidup orang asli Papua semakin baik, rasa keadilan terjawab dan hak hidup terjamin, semuanya tinggal harapan.

Dua paradigma itu jelas bertentangan dengan Pancasila yang sudah disepakati menjadi *common platform* bangsa dan Negara Indonesia, terutama sila keempat. Sila keempat mengajarkan kepada kita bahwa bahasa hikmah itulah yang harus dikedepankan. Bahasa hikmah menekankan apa dan siapa yang benar. Sila keempat jelas menyatakan bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah (kebenaran pengetahuan yang mencerahkan dan membebaskan dan kebijaksanaan (kelapangan keadilan dan pertanggungjawaban). Dalam bahasa lain, meminjam bahasa Neles Tebay, untuk mengurai dan menyelesaikan Papua membutuhkan bahasa hati (h. 217 dan 229) atau bahasa qalbu. Hikmah hanya akan muncul dari kedalaman dan kesadaran hati. Dengarkan, hayati, dan rasakan dengan sebening hati bahwa Papua adalah Indonesia. Orang-orangnya adalah orang Indonesia, bukan orang lain, sehingga mereka juga harus tercakup dalam tujuan didirikannya Negara ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, dialog adalah jalan, cara dan upaya untuk mewujudkan cita-cita eksistensial Negara ini dan menegakkan konstitusi, bukan tujuan. Tujuan dialog adalah untuk mengingatkan dan mendorong upaya mencapai kesejahteraan dan kedamaian bersama. Namun, dialog yang dilakukan harus dengan sepenuh hati, bukan sekadar formalitas dan mengurangi kekerasan, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Papua.

Yogyakarta, 29 Januari 2013.